

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Referensi

- Indroharto. (2001). *Teori dan Paktek Hukum Acara Peradilab Tata Usaha Negara*. Jakarta: Grafindo.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenada Media Group.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rimdan, D. (2012). *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soeroso. (2010). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2011). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrizzal, D. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- T, T. T. (2010). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Urip Santoso. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Widodo, T. T. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Z.A.Sangadji. (2018). *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

### B. Hasil Penelitian ( Skripsi/Tesis/Disertai, Jurnal, Makalah)

- Alfajjarin, M. F. Dasar Perimbangan Hukum bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara, Tahun 2012.
- Arwanto, B. Kewenangan PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Tahun 2018.

- Dani, U. Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, volume 7 nomor 3, Tahun 2018 .
- Dennis Oktafianto, M. A. Analisis Kekhilafan Hakim. *Jurnal Verstek*, volume 4 nomor 1, Tahun 2016 .
- Kelung, N. Pembatalan Sertifikat Hak Milik karena Cacat Administrative. *Jurnal Scientia De Lex*, volume 10 nomor 1, Tahun 2022.
- Khoiriyah, N. N. Studi Analisis tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, Volume 3 nomor 6, Tahun 2022.
- Muharam, N. Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 10 nomor 1, Tahun 2017.
- Ni Made Silvia, I. P. Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi. *Jurnal analogi hukum*, volume 3 nomor 2, Tahun 2021.
- Pattipawae, D. R. Penerapan Waktu Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Sasi*, volume 24 nomor 2, Tahun 2018.
- Riski Apriani, R. A. Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Alauddin Law Development Journal*, Volume 4 nomor 1, Tahun 2018.
- Riza, D. Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi pemerintah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, volume 3 nomor 1, Tahun 2018.
- Rompas, M. B. Kekuasaan Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Lex Administratum*, volume 1 nomor 3, Tahun 2013.

Rosadi, E. Putusan Hakim Yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal*, volume 1 nomor 1, Tahun 2016.

Sahnan, M. W. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, volume 7 nomor 3, Tahun 2019.

Sinaga, B. P. Kedudukan dan Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara, Tahun 2019.

Sitorus, S. Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Derden Verzet), *Jurnal Hikmah*, volume 15 nomor 1, Tahun 2018.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok agraria.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **D. Internet**

<https://www.rumah.com/panduan-properti/badan-pertanahan-nasional-67503>.

Diakses pukul 17.31. pada tanggal 28 Desember 2022.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1817->

[kekuasaan-kehakiman](#). Diakses pukul 11.04, pada tanggal 6 Januari 2023.

<http://hukum1926.id/2020/08/kekhilafan-atau-kekelirannya-dari-majelis->

[hakim-dalam-menjatuhkan-putusan/](#). Diakses pukul 10.52, pada tanggal 6 Januari 2023.

<https://www.boyyendratamin.com/2011/11/ruang-lingkup-dan-bentuk-putusan-ptun.html>. Diakses pukul 07.16, pada tanggal 9 Januari 2023.

<https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/05/15/kericuhan-dalam-etika-hukum-belajar-dari-pencabutan-permendag-15-2020/>. Diakses pukul 07.17, pada tanggal 7 Januari 2023.

<https://eticon.co.id/jenis-sertifikat-tanah/>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2023, pukul 06.57

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2024

